

Warga Semarang Didenda Rp1 Juta Jika Beri Uang ke Pengemis

SEMARANG (IM) - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah akan mendenda Rp 1 juta bagi warga yang memberi uang kepada pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT) mulai bulan ini.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, denda akan diberlakukan pada minggu kedua bulan September 2022. "Minggu kedua langsung kita terapkan," jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (2/9).

Fajar menjelaskan, peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2014 tentang PGOT dan Perda nomor 5 tahun 2017 diharapkan bisa menjaga agar Kota Semarang tetap bersih. "Warga Semarang bisa memberikan bantuan ke tempat yang benar seperti panti asuhan, tidak di jalan raya," ujarnya.

Untuk merealisasikan perda tersebut, pihaknya sudah membuat beberapa rencana penindakan seperti razia berkala yang diperuntukkan untuk PGOT. "Kami pasti melakukan penegakan perda," tambahnya.

Setelah diberlakukannya perda tersebut, pihaknya akan lebih intensif untuk melakukan razia sehingga perda tersebut bisa berjalan dengan efektif. "Nantinya razia akan semakin kita maksimalkan sehingga perda bisa berjalan dengan efektif," papar Fajar.

Meski demikian, Fajar secara pribadi tak mempunyai masalah dengan PGOT. Apa yang dilakukannya merupakan perintah Perda yang harus dilakukan. "Kami sayang pada mereka tapi tolong jangan minta-minta di jalan raya," tambahnya. ● pra

Wali Kota Bandung: Kenaikan Harga BBM akan Pengaruhi Komoditas Lain

BANDUNG (IM) - Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyebut kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya meringankan beban masyarakat.

"Pasti berdampak terhadap harga mudah-mudahan, coba lihat kenaikannya berpengaruh seperti apa. Mudah-mudahan ada upaya pemerintah Kota Bandung, mudah-mudahan proses pemulihan ekonomi nggak terganggu," ujarnya, Jumat (2/9).

Ia mengungkapkan apabila rencana kenaikan harga BBM subsidi terealisasi maka akan membuat sejumlah harga lainnya ikut naik. Pihaknya berupaya meringankan beban masyarakat melalui program-program yang ada.

"Dampak kenaikan BBM pasti karena biaya transportasi naik beberapa komoditas ada kenaikan. Mudah-mu-

dahan kita bisa membantu meringankan beban masyarakat," katanya.

Ia mengaku tetap akan mengikuti kebijakan pemerintahan dan berupaya meringankan beban masyarakat di Kota Bandung. "Kita kan harus ikut," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah masih menghitung dengan hati-hati harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Solar dan Pertalite.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi, Kamis (1/9).

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp 41 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun. ● pur

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN DI BOGOR

Sejumlah siswa SD mengikuti acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/9). Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya membantu menurunkan angka stunting di Indonesia dengan mengencakan kampanye GEMARIKAN di berbagai daerah demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Waktu Mepet, Dewan Sarankan Program Sami Sade Tidak Digulirkan

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana Hn menilai, kegagalan program dana bantuan keuangan infrastruktur desa atau Sami Sade pada tahun ini karena kesalahan dalam perencanaan, di mana banyak perusahaan yang masuk ketimbang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.

CIBINONG (IM) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana Hn menyarankan agar Pemkab Bogor tidak jadi menggulirkan

dana bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade). Hal itu karena waktu yang hanya tersisa empat bulan lagi.

Daen Nuhdiana Hn pun lebih memilih anggaran Sami Sade sebesar Rp 395 milyar dikembalikan ke kas daerah, ketimbang menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

"Kita harus bijak dan jangan digulirkan program dana bantuan keuangan infrastruktur desa atau Sami Sade karena sedikitnya waktu yang tersisa, anggarannya lebih baik kita kembalikan ke kas daerah dan itu bisa kita anggarakan lagi di Tahun 2023," ujar Daen Nuhdiana Hn kepada wartawan, Jumat (2/9).

Pria yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor ini melihat bahwa kega-

galan program dana bantuan keuangan infrastruktur desa atau Sami Sade dijalankan pada tahun ini karena kesalahan dalam perencanaan.

"Ini karena salah perencanaan, ditambah belum kesiapan aparatur desa, belum kesiapan aturan dan lainnya. Menurut saya, di Tahun 2020 lalu, perputaran roda ekonomi dengan adanya dana bantuan keuangan infrastruktur desa atau Sami Sade tidak berjalan maksimal, karena banyak perusahaan yang masuk ketimbang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat," sambungnya.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMDD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menjelaskan bahwa revisi Peraturan Bupati (Perbup) Bogor tentang bantuan keuangan infrastruktur desa hingga saat ini belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Permohonan revisi Perbup Bogor tentang bantuan keuangan infrastruktur desa hingga saat ini belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, walaupun sudah ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat akan digulirkan program bantuan keuangan infrastruktur desa ini," jelas Renaldi. ● gio

Pemkab Bogor Sinergi dengan PWI Gaungkan Budaya Olahraga

BOGOR (IM) - Guna menggaungkan budaya berolahraga di kalangan masyarakat Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, dengan melakukan jalan santai dengan rute dari Stadion Pakansari hingga Lapangan Tegar Beriman, dan dilanjutkan dengan Senam Merdeka di Lapangan Tegar Beriman, Jumat (2/9).

Kegiatan tersebut diikuti Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah dan Camat, SKPD dan anggota PWI.

Hal itu juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77 RI.

Plt. Bupati Bogor, Iwan

Setiawan mengungkapkan bahwa saat ini Negara Indonesia termasuk Kabupaten Bogor mulai memasuki masa transisi pandemi menjadi endemi, untuk itu menjaga kebugaran fisik dan kesehatan sangat penting untuk dilakukan.

"Dengan jiwa dan raga yang sehat, tentu dapat menunjang dalam menghasilkan ide dan gagasan yang optimal ketika menjalankan tugas," ungkapnya.

Dirinya juga mengaku apresiasi kepada PWI atas terselenggaranya kegiatan senam merdeka, hal itu sejalan dengan upaya Pemkab Bogor dalam mengaktifkan kembali tagline "Kabupaten Bogor Sport and Tourism".

"Tadi kami juga melakukan jalan sehat sebelum senam

merdeka bersama, dalam rangka memperingati 17 Agustus yang diinisiasi oleh PWI," ungkapnya.

PWI dan kalangan media berperan penting sebagai akselerator pemulihan pasca pandemi, dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus membangun semangat dan optimisme untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, melalui pendekatan jurnalisisme positif yang menjadi katalis dalam mendukung laju pemulihan sosial ekonomi.

"Saya minta agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih sehat, berolahraga secara teratur untuk memperkuat imunitas dan terhindar dari berbagai penyakit," tegasnya.



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo saat berlangsungnya Senam Merdeka.

Selanjutnya, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo mengatakan, melalui senam merdeka dirinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat

untuk turut aktif mengisi Kemerdekaan RI dan Hari Olahraga Nasional ini salah satunya dengan menjaga kebugaran dan kesehatan badan. ● gio



MONUMEN G20 DI BALI

Wisatawan yang mengendarai sepeda motor melintas di dekat monumen G20 yang baru dibangun di Denpasar, Bali, Jumat (2/9). Pembangunan monumen tersebut untuk menyambut Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger".

Pemkot Bandung Tata Ulang Puluhan PKL Dalem Kaum

BANDUNG (IM) - Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pedagang kaki lima (PKL) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, perlu adanya integrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan kewilayahan dalam upaya menertibkan PKL.

"Jadi, jangan sampai ada lagi alasan PKL tidak tahu kalau tempat mereka berjalan itu zona merah. Semua harus jelas penegasan, dan penjelasan saat sosialisasi dilakukan," kata Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Jumat (2/9).

Dikemukakan Ema Sumarna, pihaknya akan menertibkan PKL yang tersebar di 13 kecamatan dengan 54 titik. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menjadi OPD yang melakukan penertiban terhitung pertengahan September ini.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, dalam program jangka pendek. Pihaknya akan melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL di 55 titik yang tersebar se-Kota Bandung.

"Jadi sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan penertiban PKL. Memang wilayah Dalem Kaum adalah kawasan zona merah yang tidak boleh

ada PKL. Maka dari itu kita akan lakukan tindakan," kata Rasdian Setiadi.

Rasdian Setiadi menyebut, Satpol PP Kota Bandung akan menertibkan puluhan PKL yang ada di kawasan Dalem Kaum, dan Kepatihan dengan memindahkan ke tempat yang bebas dari zona merah PKL. Salah satunya di basement Alun-alun.

"Jadi, di sini itu ada 61 PKL dengan variasi jualanannya kebanyakan di aksesoris. Nah nanti itu akan digeser ke basement Alun-alun. Termasuk PKL yang ada di Kepatihan kita arahkan ke basement Kings. Dari dulu kan tempat ini menjadi opsi," ucapnya.

Menurut informasi terbaru, basement alun-alun ke depan akan dilakukan revitalisasi menggandeng OPD lain seperti Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Tata Ruang (Cipta Bintar) dan pihak swasta mendanai ulang agar PKL betah dan tidak kembali berjualan di zona merah.

"Laporan dari Kadis Cipta Bintar, nanti Oktober akan di desain ulang basement alun-alun itu seperti apa tenanturnya. Sehingga nanti kita melaksanakan penertiban itu ada solusinya. Untuk titik PKL lainnya, kita siap bekerjasama dengan tim Satgasus PKL," ujar dia. ● pra

Komisi V DPRD Jabar: Melalui Sistem ANBK Pelajar Dituntut Memiliki Kreatifitas



Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMKN 1 Garut dalam rangka monitoring terkait pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022. Kamis, (1/9).

BANDUNG (IM) - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Garut dalam rangka monitoring terkait pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022, Kamis (1/9).

Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut Anggota Komisi V DPRD Jabar, H. Ade Kaca menuturkan, hasil monitoring pihaknya menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan sampling kepada anak didik di beberapa sekolah melalui sistem ANBK ini.

"Pandangan saya sangat positif, ini mungkin harus ada program lanjutan setelah ini bagaimana evaluasi pemerintah untuk melakukan sebuah kajian-kajian dari bebe-

lajaran ini, metode apapun pemerintah akan berupaya dan mudah-mudahan program ANBK ini menjadi program andalan bagi dunia pendidikan," tuturnya.

Menurut Ade Kaca, pihaknya akan senantiasa mendorong apa yang menjadi program pemerintah pusat, khususnya di Jawa Barat. Lewat monitoring ini, pihaknya menilai pemberlakuan sistem ANBK di SMKN 1 Garut berjalan dengan baik.

"Tadi saya sudah melakukan koordinasi dengan pengawas dan para siswa di SMKN 1 Garut ini dan mereka menikmati program ANBK Tahun 2022," katanya.

"Hanya saja ada tantangan yang menuntut agar para pelajar bisa memiliki kreatifitas dan kemampuan,"

sambung Ade Kaca. Ade berharap, melalui program ANBK ini bisa membuka ruang kepada anak didik untuk berekspres lebih leluasa dan tanpa tekanan apapun.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Jawa Barat (Jabar), Yesa Sarwedi memantau pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2022 di SMAN 9 Kota Bandung dan SMKN 1 Kota Bandung, Selasa (30/8) lalu.

Sekdisdik menjelaskan, ANBK ini bertujuan mengevaluasi sistem pembelajaran di masing-masing sekolah. "Jadi, bukan menilai hasil siswa, guru maupun kepala sekolah. Tidak membandingkan sekolah satu dan lainnya,

tetapi sistem pembelajarannya yang dinilai," jelasnya.

Dengan jumlah 45 siswa yang diambil secara acak untuk kelas XI (SMA dan SMK), Sekdisdik menilai, pelaksanaan ANBK berjalan lancar, tidak ada kendala.

Sekdisdik pun berharap ada progress perbaikan dari hasil ANBK tahun kemarin dengan tahun ini. "Kita berharap, ada peningkatan dari hasil ANBK tahun kemarin (perbaikan sistem pembelajaran)," harapnya.

Kegiatan ANBK sesuai dengan skedul. "Fasilitas sekolah dan siswa pun sudah sangat siap," ujarnya.

Begitupun dengan pelaksanaan ANBK di SMKN 1 Kota Bandung. Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Dini Siti Anggraeni menyampai-

kan, pelaksanaan ANBK di SMKN 1 Kota Bandung berlangsung lancar, aman, dan kondusif.

"Kami berharap ANBK ini bisa betul-betul mengcapture peta pendidikan yang ada di SMKN 1 Bandung terkait dengan input, proses, dan output-nya," ucapnya saat ditemui di sekolah, Jln. Wastukencana No.3, Kota Bandung.

Karena, lanjutnya, ANBK itu sangat komprehensif untuk melihat dari aspek kognitif, kepribadian dan karakter siswa (dengan survei karakter) serta kondisi pembelajaran secara keseluruhan melalui survei lingkungan belajar.

"Kami berharap, hasil ANBK ini juga bisa diketahui oleh pihak sekolah untuk refleksi," pungkasnya. ● lys